



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA 2023

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG
PURWAKARTA



PENGANTAR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 serta Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Nomor ND-38/WKN.08/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023.

Pencapaian akuntabilitas kinerja KPKNL Purwakarta saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi, hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Purwakarta. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran KPKNL Purwakartayang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Purwakarta
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahjudi Prajogo



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi Kpknl Purwakarta.....	4
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	6
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	7
1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	7
2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara	8
3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian.....	10
4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang.....	10
5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi	11
6. Permasalahan pada Subbagian Umum	11
7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	14
B. Penetapan Kinerja.....	18
C. Addendum Kontrak Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisis Kinerja	55
C. Realisasi Anggaran	65
D. Inovasi	66
E. Prestasi Dan Penghargaan Tahun 2023	69
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	72
A. Checklist Kelengkapan Narasi IKU.....	72
B. Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Purwakarta Tahun 2023	86

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Purwakarta sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL PURWAKARTA

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi No 9 Kab. Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dengan total luas wilayah seluas 4.776,75 KM². Stakeholder yang dilayani KPKNL Purwakarta yaitu

- Untuk Pengelolaan Kekayaan Negara sejumlah 92 satker
- Pelayanan Penilaian sejumlah 92 satker dan 3 pemerintah daerah
- Pelayanan Lelang kami melayani dari perbankan dan non perbankan termasuk pembeli lelang
- Piutang Negara kami mengurus piutang negara macet dari instansi pemerintah pusat dan daerah

KPKNL Purwakarta berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Purwakarta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Purwakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Purwakarta telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto **”BAIK”**.

Bersih : Bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih dalam melayani stakeholder.

Akuntabel : Hasil Kerja dapat dipertanggung jawabkan secara transparan sesuai dengan ketentuan.

Inovatif : Selalu menemukan cara baru dalam bekerja untuk menghadapi dinamika organisasi.

Konsisten : Bekerja dengan baik secara terus menerus dalam kondisi apapun.

Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Purwakarta dalam melaksanakan tugas bergerak bersama ke arah yang lebih baik dalam segala aspek sesuai Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berdasarkan **Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**, KPKNL Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;

3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

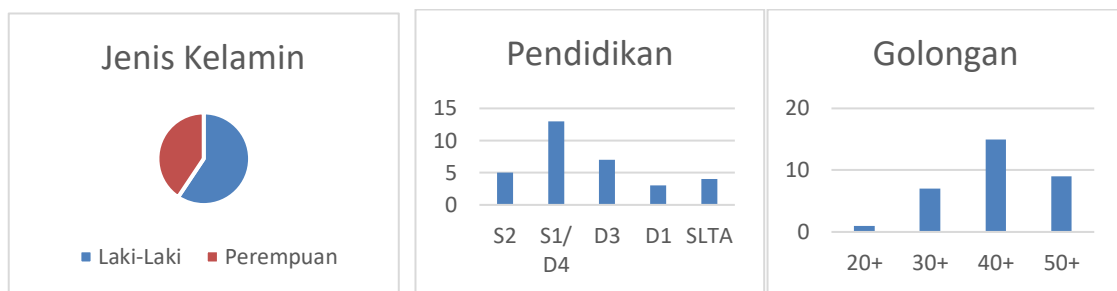
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut :

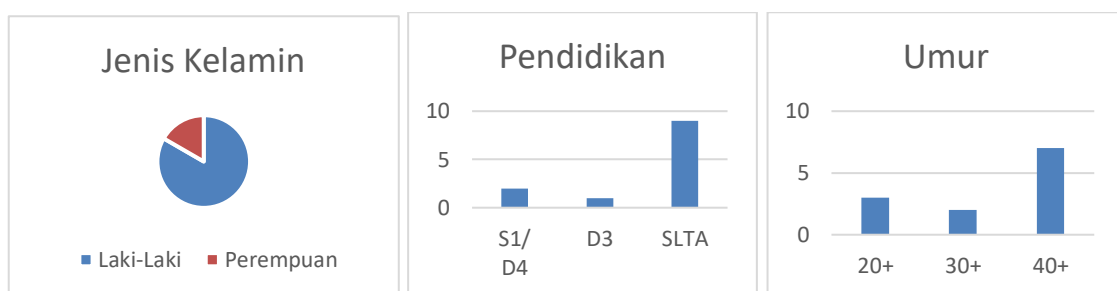


Rincian sumber daya manusia pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut:

A. ASN sebanyak 32 Pegawai



B. PPNPN sebanyak 12 pegawai



C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Purwakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

• **Triwulan I**

- PNBP BMN Q1 berasal dari sewa dan penjualan Barang Milik Negara.
- Bidang tanah yang disertifikatkan belum dilakukan pemberkasan dikarenakan Satker masih menyiapkan dokumen yang diperlukan dan Satker masih kordinasi dengan kantah untuk menentukan jadwal pengukuran.
- Portofolio aset masih proses verifikasi data survey dan menunggu data sekunder dari BPS.
- Verifikasi data awal target pelaksanaan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
- Kantor Pertanahan menunggu penetapan lokasi target bidang yang akan dilakukan pensertipikatan BMN berupa tanah.

• **Triwulan II**

- PNBP BMN Q2 berasal dari sewa dan penjualan Barang Milik Negara namun capaian di Q2 tidak sebesar capaian yang diperoleh di Q1.

- b. Telah melaksanakan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada beberapa satuan kerja namun terdapat beberapa BMN target yang tidak dilakukan perhitungan dikarenakan kode barang yang digunakan tidak sesuai dengan fisik BMN yang ada, terhadap hal ini obyek dimaksud dikeluarkan dari target.
 - c. Telah dilakukan survei dan perhitungan atas BMN yang menjadi target portofolio sebanyak 22 NUP.
 - d. Satuan Kerja belum mengetahui atau masih perlu melengkapi dokumen permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah dan kurangnya SDM pada satuan kerja sehingga proses permohonan lambat.
- **Triwulan III**
 - a. Capaian PNBP pada periode Q3 cukup tinggi yang berasal dari pemindahtanganan/penjualan BMN dan penjualan barang rampasan/tegahan namun PNBP yang berasal dari sewa BMN kurang maksimal.
 - b. Telah melaksanakan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada beberapa satuan kerja dan diketahui terdapat beberapa rumah negara yang tidak berpenghuni.
 - c. Pada periode ini telah diselesaikan 4 NUP evaluasi dan telah menerbitkan 21 paket rekomendasi dalam rangka evaluasi kinerja BMN.
 - d. Penyelesaian pensertipikatan BMN berupa tanah masih terkendala pada pengajuan permohonan dari satuan kerja.
 - **Triwulan IV**
 - a. Capaian PNBP pada periode Q3 cukup tinggi yang berasal dari sewa BMN.
 - b. Telah menuntaskan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebanyak 313 NUP dan perhitungan optimalisasi tahun 2022 sebanyak 527 NUP.
 - c. Pada periode ini telah diselesaikan 26 NUP dalam rangka evaluasi kinerja BMN.
 - d. Diketahui beberapa bidang tanah dengan luasan yang berbeda dan perlu penelusuran kembali.

2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara masih terdapat beberapa permasalahan di Seksi Piutang Negara, antara lain:

- **Triwulan I**
 - a. Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara yang sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial

(debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui keberadaan dan kejelasan dokumen kepemilikannya).

- b. BKPN yang diurus sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui keberadaan dan kejelasan dokumen kepemilikannya).

- **Triwulan II**

- a. Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang didukung dengan barang jaminan yang tidak potensial (tidak marketable), lokasi barang jaminan belum diketahui, barang jaminan milik Pihak Ke-3 maupun barang jaminan yang sudah diperjualbelikan.
- b. Kemampuan dari Penanggung Hutang sangat rendah.
- c. Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang karena merasa bukan hutang pribadi maupun merasa tidak memiliki hutang.

- **Triwulan III**

- a. Rendahnya tingkat kemampuan Penanggung Hutang untuk melunasi hutangi, barang jaminan tidak potensial/tidak ditemukan, debitur tidak ditemukan.
- b. Rendahnya tingkat kemampuan Penanggung Hutang untuk melunasi hutangi, barang jaminan tidak potensial/tidak ditemukan, debitur tidak ditemukan.
- c. Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang didukung dengan barang jaminan yang tidak potensial (tidak marketable), barang jaminan belum diketemukan, barang jaminan milik Pihak Ke-3 maupun barang jaminan yang sudah diperjualbelikan.
- d. Kemampuan dari Penanggung Hutang sangat rendah.
- e. Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang karena merasa bukan hutang pribadi maupun merasa tidak memiliki hutang.

- **Triwulan IV**

- a. Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang.
- b. Tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah sehingga mempengaruhi potensi penerimaan PNBPN.

Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara yang sebagian besar merupakan BKPN dimana Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang serta tingkat kemampuan Penanggung Hutang yang rendah.

3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Dalam pelaksanaan proses penilaian masih terdapat beberapa, antara lain:

- a. Terdapat permohonan penilaian Non-BMN dengan jumlah objek yang banyak yang masuk dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan penilaian BMN, sehingga menyebabkan waktu pengerjaan laporan yang terbatas. Hal ini mengakibatkan penyelesaian laporan penilaian sewa melewati SOP.
- b. Terdapat beberapa penugasan lain (penyusunan DKPB dan analisis hasil survey data properti) yang membutuhkan sumber daya penilai pada akhir tahun sehingga menyebabkan terganggunya penyelesaian permohonan penilaian yang sudah berjalan di waktu yang bersamaan.

4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang, antara lain:

• Triwulan I

- a. Banyaknya lelang TAP.
- b. Beberapa permohonan lelang masih ada yang meminta lelang konvensional sehingga lelang menjadi kurang optimal (lelang hasil kayu dari tangan pertama).

• Triwulan II

- a. PNBP Lelang Q2 berasal dari bea lelang pembeli, penjual, permohonan lelang, batal, dan wanprestasi. Sebagian besar berasal dari lelang eksekusi hak tanggungan, namun ada juga dari lelang non eksekusi wajib BMN/D, rampasan kejaksaan, harta pailit, pengadilan dan non eksekusi sukarela.
- b. Banyaknya lelang TAP.

• Triwulan III

- a. PNBP Lelang Q3 berasal dari bea lelang pembeli, penjual, permohonan lelang, batal, dan wanprestasi. Sebagian besar berasal dari lelang eksekusi hak tanggungan, namun ada juga dari lelang non eksekusi wajib BMN, BMD, rampasan kejaksaan, dan non eksekusi sukarela.
- b. Banyaknya lelang TAP.
- c. Banyaknya obyek lelang yang kurang marketable.
- d. Adanya Obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur.
- e. Adanya lelang kayu perhutani yang secara aturan masih diperbolehkan dilakukan secara konvensional, sehingga capaian lelang e-auction dan permohonan online tidak bisa maksimal

• Triwulan IV

- a. Kondisi ekonomi yang belum stabil, dan adanya beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menjadi salah satu penyebab masih banyaknya lelang TAP.

- b. Kebijakan pemohon lelang terkait penurunan nilai limit dimana memerlukan beberapa kali lelang untuk sampai pada nilai likuidasi.
- c. Beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menyebabkan calon pembeli memerlukan biaya dan waktu lebih apabila menjadi pemenang lelang terkait pengosongannya.
- d. Banyaknya lelang TAP.
- e. Banyaknya obyek lelang yang kurang marketable.
- f. Adanya lelang kayu perhutani yang secara aturan masih diperbolehkan dilakukan secara konvensional, sehingga capaian lelang e-auction dan permohonan online tidak bisa maksimal

5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan lelang, masih terdapat peserta lelang mencantumkan nomor rekening, nama rekening dan nama Bank yang salah, sehingga menghambat Bendahara Penerima dalam pengembalian tepat waktu dan akhirnya terjadi miskomunikasi antara peserta lelang tersebut dengan Bendahara Penerima, selain itu masih terdapat beberapa peserta lelang yang tidak mencantumkan nomor telepon sehingga apabila terdapat kendala dalam pengembalian uang jaminan lelang tidak bisa melakukan konfirmasi ke peserta lelang yang bersangkutan.
- b. Adanya gangguan pada aplikasi perbankan dan aplikasi penunjang lainnya pada Bendahara Penerimaan dapat menghambat proses pengerjaan, sedangkan pada Bendahara Penerimaan sendiri terdapat SOP yang harus dipenuhi.
- c. Tidak adanya pernyataan yang jelas pada penggunaan NPWP untuk penyetoran PPh final pada transaksi lelang, mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran penggunaan NPWP pada masing-masing KPKNL. Hal tersebut juga dilatarbelakangi karena perbedaan kebijakan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya sehingga Bendahara Penerimaan mengalami hambatan setiap akan menyetorkan PPh Final yang berasal dari transaksi lelang.
- d. Sarana dan prasarana dokumentasi perlu penambahan.
- e. Banyak gugatan perkara yang ditujukan/diterima KPKNL Purwakarta, namun Anggaran DIPA Penanganan Perkara terbatas.

6. Permasalahan pada Subbagian Umum

Permasalahan yang kerap terjadi pada Sub Bagian Umum, sebagai berikut:

- **Triwulan I**
 - a. Seluruh pegawai telah memberikan perhatian dan mengikuti berbagai jenis program pengembangam kompetensi, namun tidak semua Program memberikan Jam Pelatihan yang tinggi. Meskipun sudah mendaftar diklat belum tentu dipanggil, karena ada keterbatasan kuota.
 - b. Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Adanya perubahan reformulasi IKU IKKPA.
 - d. Penetapan target triwulanan IKU yang kurang tepat, diperlukan adanya adendum target IKU.
- **Triwulan II**
 - a. Awal Triwulan 2 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, mengakibatkan berkurangnya pelaksanaan diklat klasikal
 - b. Adanya ketidaksesuaian timeline pelaksanaan belanja modal sehingga mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan
- **Triwulan III**
 - a. Keterbatasan jumlah kuota peserta diklat
 - b. Informasi pelatihan yang terdapat di aplikasi SEMANTIK hanya dapat diakses oleh Pegawai yang bersangkutan.
 - c. Kegiatan FGD secara khusus dalam satu kantor belum diadakan.
 - d. Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - e. Formula perhitungan IKPA dan SMART sub Realisasi Anggaran dan efisiensi yang kontradiktif.
 - f. Kurangnya dana pada output PN dan Bankum, dikarenakan banyaknya perkara dan sulitnya penyelesaian Piutang Negara.
- **Triwulan IV**
 - a. Keterbatasan jumlah kuota peserta diklat
 - b. Informasi pelatihan di aplikasi SEMANTIK hanya dapat diakses oleh Pegawai yang bersangkutan.
 - c. Aplikasi SIMAN dan SAKTI, maupun E-Prime Aset yang menjadi sumber utama bahan pelaporan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga pelaporan dimungkinkan terlambat.
 - d. Volume/intensitas yang tinggi para Penilai mengakibatkan permohonan penilaian BMN untuk penghapusan tertunda.
 - e. Adanya peraturan yang tidak mengijinkan munculnya biaya pemeliharaan atas tanah untuk rumah negara.
 - f. Mutasi yang terjadi pada akhir tahun menyebabkan perpindahan tunjangan kinerja pegawai. Pada aplikasi e-tukin mengalami perbedaan sehingga harus dipastikan pengajuan tunjangan kinerjanya oleh kantor baru ataukah oleh kantor lama.

7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

- a. Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal secara umum adalah adanya peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal sering mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN sehingga diperlukan penyesuaian
- b. Adanya kepentingan dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi memungkinkan adanya moral hazard yang dapat menghambat kelancaran tugas, sehingga diperlukan kehati-hatian dan integritas.
- c. Banyaknya peraturan yang mendasari penugasan pada Seksi Kepatuhan Internal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Purwakarta Tahun 2023 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Rencana Strategis

1. Misi

Misi KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna.

2. Tujuan

KPKNL Purwakarta mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggungjawab, profesional dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Perwujudan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Pengamanan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- 3) Perwujudan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Perwujudan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.

4. Kebijakan

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Purwakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- 3) Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- 4) Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- 5) Menerapkan sistem aplikasi di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Purwakarta tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Purwakarta meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Purwakarta :

- **Pelayanan di bidang Lelang**

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
- b. Memberikan konsultasi kepada *stakeholder* tentang peraturan, syarat dan prosedur lelang;
- c. Melaksanakan lelang online secara optimal;
- d. Mempercepat proses penyelesaian Risaiah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
- e. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- f. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

- **Pelayanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara**

- a. Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;

- b. Melakukan kegiatan bersifat persuatif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang dan pihak-pihak terkait;
 - d. Menyampaikan laporan yang benar, cepat dan akurat.
- **Pelayanan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**
 - a. Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarahan dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
 - b. Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
 - d. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;
 - e. Sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyelesaian pensertipikatan BMN berupa tanah.
- **Pelayanan di Bidang Penilaian**
 - a. Memberikan layanan penilaian yang aktif dan solutif;
 - b. Mempercepat penyelesaian laporan penilaian yang berkualitas;
 - c. Mewujudkan pelaksanaan penilaian yang akuntabel yang tercermin melalui ketergunaan hasil penilaian dalam Keputusan Pengelolaan BMN.
- **Pelayanan di Bidang Hukum dan Informasi**
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Bendahara Penerimaan secara optimal
 - b. Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
 - c. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
 - d. Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
 - e. Menerapkan aplikasi Sibankum;
 - f. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;
- **Pelayanan di Bidang Kepatuhan Internal**
 - a. Melaksanakan penyusunan jadwal pemantauan di lingkungan KPKNL.
 - b. Melaksanakan pemantauan pengendalian intern dan penyusunan pelaporan pemantauan pengendalian internal di lingkungan KPKNL
 - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPKNL.

- d. Melaksanakan pemantauan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL
- e. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPKNL
- f. Melaksanakan penilaian penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan penyusunan pelaporan penilaian penerapan PIPK di lingkungan KPKNL.
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi atas tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai di lingkungan KPKNL.
- h. Melaksanakan penyusunan/ penyempurnaan Konsep Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko di lingkungan KPKNL.
- i. Melaksanakan penetapan Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko di lingkungan KPKNL.
- j. Melaksanakan penatausahaan dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko di lingkungan KPKNL.
- k. Melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi implementasi pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan KPKNL.
- l. Melaksanakan penyiapan bahan Addendum Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko di lingkungan KPKNL.
- m. Melaksanakan reviu implementasi pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan KPKNL.
- n. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan KPKNL.
- o. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- p. Melaksanakan penyusunan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPKNL.
- q. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan audit dan/atau reviu oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah di lingkungan KPKNL.
- r. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/temuan aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah di lingkungan KPKNL.
- s. Melaksanakan penyusunan tanggapan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah di lingkungan KPKNL.
- t. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- u. Melaksanakan koordinasi penerapan kerangka kerja integritas di lingkungan KPKNL.

- v. Melaksanakan monitoring terhadap efektivitas penerapan kerangka kerja integritas di lingkungan KPKNL.
 - w. Melaksanakan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan KPKNL.
 - x. Melakukan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
- **Pelayanan di Bidang Umum**
- a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Purwakarta dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
 - b. Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompetensi tinggi;
 - c. Mengelola anggaran dengan optimal;
 - d. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

B. Penetapan Kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Purwakarta merupakan misi KPKNL Purwakarta. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL Purwakarta. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu :

- 1). Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
- 2). Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- 3). Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
- 4). Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
- 5). Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 6). Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif
- 7). Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
- 8). Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal
- 9). Organisasi yang fit for purpose;
- 10). Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwakarta :

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Indeks Integritas
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang
5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Persentasi Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
10. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online
11. Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
12. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
13. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
14. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)
16. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
17. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
18. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
19. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
20. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1b-CP Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4b-CP Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9.	Organisasi yang fit-for-purpose	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
10.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	10a-CP Indeks Integritas	88,67
		10b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Skala 4)

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp370.295.000,00
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp3.702.000,00
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3.	Pengelolaan Aset	Rp366.593.000,00
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
	Dukungan Manajemen	Rp2.189.070.000,00
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp13.380.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2.158.650.000,00
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp10.560.000,00
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp6.480.000,00
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat  Ditandatangani Secara Elektronik Tavianto Noegroho	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta  Ditandatangani Secara Elektronik Wahjudi Prajogo
--	--

C. Addendum Kontrak Kinerja

- Target Penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2023 adalah sebesar Rp750.000.000,- dan telah tercapai pada triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.056.034.104,- karena target penurunan outstanding Piutang Negara sudah tercapai di triwulan III maka dilakukan addendum target menjadi sebesar Rp1.060.000.000,-
- Pada tahun 2023 terdapat addendum Perjanjian Kinerja nomor PK-04A/WKN.08/2023 tanggal 25 September 2023. Addendum tersebut yaitu :

a) Perubahan Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder perspective</i>		<i>Stakeholder perspective</i>	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif

b) Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	4c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
6a-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

c) Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan				
10a-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67
Internal Procces						Customer perspective					
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif				
3c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	4c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
Internal Procces						Learning and growth perspective					
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
4c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

d) Penambahan IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-	-	10a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	60

e) Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
10b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang karena IKU tersebut dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat

f) Perubahan *Trajectory* Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Purwakarta, 25 September 2023
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Negara Jawa Barat
Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahjudi Prajogo

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dituangkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian pada 2023 sebesar **110,37%** yang sebelumnya tahun 2022 **111,811%**. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:



Pada Tahun Anggaran 2023, secara umum KPKNL Purwakarta telah mencapai target yang ditetapkan namun terdapat 2 (dua) IKU yang masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **110,37%**. Lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2023:

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)	30%						31,65%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							104,98%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	95,96%	14%	30%	95,96%	95,96%	kuning
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	105%	14%	30%	131,25%	120,00%	hijau

1c-CP	Indeks Integritas	P/M	88,67	89,17	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)	20%						20,87%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							104,36%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	90,4%	14%	50%	90,45%	90,45%	kuning
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	118,3%	14%	50%	118,27%	118,27%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28,22%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							111,90%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	76,6%	19%	37%	112,58%	112,58%	hijau
3b-CP	Persentasi Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100%	148,2%	19%	37%	148,22%	120,00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	100,00%	14%	27%	100,00%	100,00%	hijau
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							113,73%	
4a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	98,9%	14%	33%	105,25%	105,25%	hijau
4b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	P/M	86%	99,7%	14%	33%	115,95%	115,95%	hijau
4c-CP	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	151,6%	14%	33%	151,57%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70,00	90,08	14%	50%	128,69%	120,00%	hijau
6	Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							105,94%	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/L	86%	91,1%	19%	100%	105,94%	105,94%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,78%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	120%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							116,48%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	109,43%	14%	33%	109,43%	109,43%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	192%	14%	33%	192%	120,00%	hijau

8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15%	0%	14%	33%	200%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	96,49	14%	100%	120,62%	120,00%	hijau
10	Penguatan Pengawasan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							120,00%	
10a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60,00	97,76	14%	100%	162,93%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								110,37%	hijau

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2023 sebesar **Rp17.473.832.339,-** atau sebesar **95,96%** dari total target sebesar **Rp18.209.500.000,-**. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1.	PNBP BMN	Rp6.400.000.000,-	Rp9.239.221.640,-	144,36%
2.	PNBP PN	Rp2.500.000,-	Rp4.113.392,-	164,54%
3.	PNBP Lelang	Rp11.807.000.000,-	Rp8.230.497.307,-	69,71%
	Total	Rp18.209.500.000,-	Rp17.473.832.339,-	95,96%

K-Wide	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	18,80%	25,66%	25,66%	58,12%	58,12%	95,96%	95,96%	
Capaian	188%	85,53%	85,53%	96,87%	96,87%	95,96%	95,96%	

IKU ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada PNBP Lelang. Beberapa yang menyebabkan capaian belum maksimal yaitu banyaknya lelang TAP, banyaknya objek lelang yang kurang marketable dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Triwulan IV Capaian Penerimaan PNPB terealisasi sebesar 95,96% atau belum mencapai target yang ditetapkan dengan rincian PNPB BMN 144 % dari target tahunan; PNPB PN 164 % dari target tahunan; PNPB Lelang 70% dari target tahunan

b. Akar Masalah

- Terdapat beberapa persetujuan sewa yang belum ditindaklanjuti dan persetujuan penjualan BMN yang belum dilakukan penjualan secara lelang.
- Terdapat beberapa persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti dan penjualan BMN tidak ada peminat.
- Masih banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Lelang Eksekusi Harta Pailit.
- Kemampuan finansial debitur / Penanggung Hutang yang sebagian besar tergolong ekonomi kurang mampu.
- Tidak ada itikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan utang.
- Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial (barang jaminan tidak marketable/bermasalah)

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Seksi PKN telah melaksanakan koordinasi yang intensif kepada satuan kerja dan wasdal terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti dalam batas waktu persetujuan BMN belum berakhir,
- Melakukan koordinasi dengan satker yang telah terbit persetujuan baik pemanfaatan maupun penjualan agar segera ditindaklanjuti
- Seksi PN telah melaksanakan Penagihan secara langsung sekaligus Penyampaian Surat Paksa kepada debitur/Penanggung Hutang, Penyerahan dari KPU Karawang dan RSUP Dr. Hasan sadikin Bandung.
- Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Debitur an. Edi Suryanto penyerahan dari KPU Karawang
- Peningkatan tahap pengurusan Piutang Negara penyerahan dari DJKN a.n. KUD Karya Mekar dan penyerahan dari BLUPPB Karawang a.n. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (sekarang PT. Perikanan Indonesia)
- Koordinasi dengan Kantah Subang terkait barang jaminan utang a.n. KSU Fortuna yang belum ditemukan lokasi secara pasti untuk ditindaklanjuti dengan lelang
- Intensifikasi crash program keringanan utang,
- Permohonan informasi Debitur ke Disdukcapil Jakarta Timur

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan, Satker dan Perbankan di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang dan Rumah BUMN serta pelaku UMKM di Purwakarta
- Melakukan sosialisasi terkait website lelang.go.id ke para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Subang
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Koordinasi dengan satuan kerja yang masa sewa BMN akan berakhir pada tahun 2024.
- Koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki BMN dalam kondisi rusak berat berdasarkan monitoring data master aset SIMAN, agar segera melakukan proses penjualan BMN
- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada para pemohon lelang
- Menindaklanjuti kerjasama dengan para pelaku UMKM dalam rangka Lelang UMKM
- Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang berpotensi laku dan AYDA
- Melakukan Pemanggilan kepada debitur/Penanggung Hutang dan Pemeriksaan Barang jaminan Hutang debitur/Penanggung Hutang

2. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Target persentase produktivitas lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 sebesar **80%**. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebesar **105,00%** dengan persentase capaian **131,25%** atau capaian maksimal **120%**.

K-Wide	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	100%	Max/TLK
Realisasi	59,91%	87,68%	87,68%	105%	105%	105%	105%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Triwulan IV Capaian Produktivitas Lelang terealisasi sebesar 105% berasal dari : lelang sukarela 78%; lelang non eksekusi wajib 76%; lelang eksekusi Hak Tanggungan 7%; lelang eksekusi diluar Hak Tanggungan 65%,

b. Akar Masalah

- Masih banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Lelang Eksekusi Harta Pailit.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, satker, dan pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Karawang dan Subang
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi lelang.go.id kepada mahasiswa STIE Wibawa Karta Raharja
- Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang potensial laku
- Koordinasi dengan pemohon lelang terutama yang potensial AYDA.
- Melakukan sosialisasi terkait website lelang.go.id ke para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Subang
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dan Penggalan Potensi lelang kepada para pemohon lelang
- Melakukan koordinasi dengan Kantah terkait proses pembuatan akun terkait pengurusan SKT lelang
- Melakukan koordinasi dengan seksi PKN terkait proses penghapusan dengan tindak lanjut penjualan BMN
- Sosialisasi ketentuan PMK 122/2023 kepada para *stakeholder*
- Menindaklanjuti kerjasama dengan para pelaku UMKM
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik

3. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Target Indeks Integritas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 sebesar **88,67**. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebesar **89,17** dengan persentase capaian **100,56%**.

K-Wide	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	-	-	-	-	-	88,67	88.67	Max/AVG
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Realisasi berasal dari penilaian tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)

b. Akar Masalah

- Penilaian dilakukan oleh internal dan eksternal berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) sehingga tingkat kendali lemah.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan Pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan pengendalian sebagai tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

4. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Target Realisasi Pokok Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 secara keseluruhan ditetapkan sebesar

Rp269.407.000.000,-. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **Rp243.674.725.055,-** atau sebesar **90,45%**, dengan rincian sebagai berikut:

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,29%	33,73%	33,73%	49,83%	49,83%	90,45%	90,45%	
Capaian	116,45%	84,33%	84,33%	71,19%	71,19%	90,45%	90,45%	

Uraian IKU Tahun 2023	Target IKU Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	Rp269.407.000.000,-	Rp243.674.725.055,-	90,45%
Pokok Lelang Kelas I	Rp199.572.000.000,-	Rp148.313.105.655,-	74,32%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp69.835.000.000,-	Rp95.361.619.400,-	136,55%

Seperti hal nya PNPB Lelang IKU ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu untuk Pokok Lelang Kelas I. Beberapa yang menyebabkan capaian belum maksimal yaitu banyaknya lelang TAP, banyaknya objek lelang yang kurang marketable dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.

a. Isu Utama dan Implikasi

- Capaian pokok lelang di Q4 sebesar Rp243.674.725.055,00 atau 90,45% dari target tahunan sebesar Rp269.407.000.000,00

b. Akar Masalah

- Masih banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis lelang eksekusi Hak Tanggungan permohonan Perbankan dan dari lelang eksekusi harta pailit.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, satker, dan pelaku UMKM di wilayah Purwakarta
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi lelang.go.id kepada mahasiswa STIE Wibawa Karta Raharja
- Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang potensial laku

- Koordinasi dengan pemohon lelang terutama yang potensial AYDA.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Koordinasi dan penggalian potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, Satuan Kerja, dan pelaku UMKM di wilayah Purwakarta
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi lelang.go.id
- Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang potensial laku
- Koordinasi dengan pemohon lelang dalam rangka pelaksanaan AYDA.
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik

5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Target persentase penurunan outstanding piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2023 sebesar **Rp750.000.000,-** dan terdapat addendum pada triwulan III menjadi **Rp1.060.000.000,-**. Dari target tersebut dapat direalisasikan penurunan outstanding piutang Negara sebesar **Rp1.253.678.702,-** dengan persentase nilai realisasi **118, 27%**.

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	8,37%	25,30%	25,30%	99,63%	99,63%	118,27%	118,27%	
Capaian	83,70%	84,33%	84,33%	166,05%	166,05%	118,27%	118,27%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Capaian realisasi penurunan outstanding berasal dari pelunasan crash program keringanan, penerbitan PSBDT dan angsuran utang

b. Akar Masalah

- Tingkat kemampuan Debitur untuk penyelesaian utang sangat rendah;
- Tidak ada itikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan utang;
- Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial (barang jaminan tidak marketable / bermasalah).

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah melaksanakan Penagihan secara langsung sekaligus Penyampaian Surat Paksa kepada debitur/Penangung Hutang, Penyerahan dari KPU Karawang dan RSUP Dr. Hasan sadikin Bandung.

- Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Debitur an. Edi suryanto penyerahan dari KPU Karawang
- Penelitian Lapangan terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Utang penyerahan dari RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam rangka penerbitan PSBDT
- Membuat surat Panggilan/himbauan penyelesaian hutang kepada Debitur dan Pemilik Barang Jaminan;
- Membuat surat pemberitahuan crash program keringanan utang kepada semua Debitur;
- Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Tindakan keperdataan/pembatasan administrasi
- Penyampaian Surat Paksa dan Penelitian Lapangan BKPN an. Sopyan Sujani, Sim Atong dan PT Surya Telemedia;
- Koordinasi dengan LPDB KUMKM terkait rencana pelaksanaan lelang barang jaminan penyerahan dari LPDB KUMKM;
- Permintaan dokumen asli barang jaminan kepada Pemkab Subang, Pemkab Karawang, Pemprov Jawa/ Bank Jabar Banten Syariah
- Melakukan penagihan langsung dan intensifikasi Crash Program Keringanan Utang
- Peningkatan tahap pengurusan Piutang Negara penyerahan dari DJKN a.n. KUD Karya Mekar dan penyerahan dari BLUPPB Karawang a.n. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (sekarang PT. Perikanan Indonesia)
- Melakukan pemeriksaan Piutang Negara Penanggung Utang a.n. Wihana Yusach dalam rangka penerbitan PSBDT dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PSBDT a.n. Wihana Yusac
- Melakukan penelitian lapangan terhadap Penanggung Utang a.n. Mulyadi dalam rangka penerbitan PSBDT dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PSBDT
- Membuat surat panggilan, penelitian barang jaminan utang, pemblokiran barang jaminan utang, menerbitkan Surat Paksa BKPN a.n. KUD Karya Mekar.
- Penelitian lapangan dalam rangka penerbitan PSBDT.
- Koordinasi secara langsung/via surat dengan Penyerah Piutang (Dinas Ketahanan Pangan Kab. Karawang, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Subang dan Pemprov Jabar/BJB Syariah Bandung) terkait permintaan dokumen asli barang jaminan,
- Lelang barang jaminan utang BKPN penyerahan dari LPDB KUMKM (a.n. Kopontren Al Ikhlas dan KSU Mitra Sejahtera)
- Koordinasi via surat dengan Kantah Karawang dan Kantah Purwakarta terkait barang jaminan,
- Permohonan informasi Debitur ke Disdukcapil Jakarta Timur.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan frekuensi penagihan dan menawarkan penyelesaian dengan mengikuti crash Program serta menawarkan penyelesaian dengan dibantu oleh keluarga Penanggung Utang
- Penagihan secara langsung sekaligus intensifikasi crash program keringanan utang

6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Target jumlah NUP yang menjadi perhitungan di tahun 2023 berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu: (1) Perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK sebanyak 313 NUP ; (2) Perhitungan optimalisasi BMN dengan SBSK yang telah didata dan dihitung tahun 2022 sebanyak 527 NUP.

Target Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 KPKNL Purwakarta sebesar **68%**, dan telah terealisasi sebesar **76,55%** atau dengan persentase capaian **112,58%**.

KPKNL	SS.3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
Purwakarta	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target		50%	50%	55%	55%	68%	68%	Max/TLK
Realisasi		71,3%	71,3%	78,3%	78,3%	76,55%	76,55%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	112,58%	112,58%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Q4 2023, capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 76,55% dari target tahunan sebesar 68%.

b. Akar Masalah

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK
- Melakukan pendataan dan perhitungan dalam rangka optimalisasi BMN terhadap BMN yang telah dilakukan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK pada tahun 2022

- Sosialisasi kepada satuan kerja target tentang pendataan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan verifikasi data awal target pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2024
- Sosialisasi awal kepada satuan kerjayang menjadi target (TNI dan POLRI) tentang pendataan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK.
- Melakukan pendataan dan perhitungan optimalisasi BMN dengan SBSK yang telah dilakukan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK pada tahun 2023

7. Persentase BMN berupa tanah yang Disertipikatkan

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 sebesar **100%** (sebanyak **365** bidang tanah yang disertipikatkan). Dari target tersebut, dapat direalisasikan % dengan capaian **149,04%** (sebanyak **544** bidang tanah yang telah disertipikatkan) atau dengan persentase capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
Purwakarta	3b-CP Persentase BMN berupa tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi		7,12%	7,12%	81,9%	81,9%	149,04%	149,04%	
Capaian		17,81%	17,81%	120%	120%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Q4 2023, capaian persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan sebesar 135%

b. Akar Masalah

- Data objek sertifikasi tidak didukung dokumen yuridis (Dokumen Perolehan);
- Satuan kerja tidak mengetahui letak objek sertifikasi dan batas-batas wilayah;
- Data aset SIMAN tidak valid.
- Pada triwulan II tahun 2023 terdapat permasalahan Target K1 yang telah terbit sertifikat untuk satuan kerja Biro Pengelolaan BMN, Kementerian PUPR; Terdapat target K4 yang memiliki sertifikat yang salah ukuran sehingga menunggu waktu

pengukuran ulang (telah terjadi hibah sebagai tanah); Terdapat target K4 dengan sertifikat hilang pada satker KPP Pratama Subang; Terdapat target K2 yang bersertifikat an pihak ketiga, namun sertifikat tersebut hilang pada Satker PN Karawang; Terdapat target K2 yang belum keluar dari sertifikat induk, namun pihak sertifikat induk belum bersedia pengurusan di BPN, pada satker Kemenag Purwakarta; Kurangnya SDM pada satuan kerja yang merangkap tusi sehingga belum menyelesaikan proses permohonan

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Sosialisasi sertifikasi 2023 telah dilaksanakan di awal Januari oleh KPKNL Purwakarta, dan mendorong satker untuk menyiapkan dokumen pensertipikatan BMN berupa tanah serta koordinasi dengan Kantah setempat
- Berkoordinasi dengan satker maupun kantah secara intens.
- Usulan revisi penlok untuk mengganti beberapa NUP yang tidak bisa dilakukan pensertipikatan;

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengadakan sosialisasi kepada satuan kerja yang menjadi target sertifikasi

8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Target persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 sebesar **100%** (sebanyak **9** BKPN yang telah dinyatakan selesai). Dari target tersebut, dapat direalisasikan **100%** (sebanyak **9** BKPN yang telah dinyatakan selesai).

KPKNL	SS.3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
Purwakarta	3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	10,00%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	11,11%	33,33%	33,33%	66,7%	66,7%	100%	100%	
Capaian	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	100%	100%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Q4 2023, capaian Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar 100% yaitu berasal dari pelunasan crash program dan penerbitan PSBDT

b. Akar Masalah

- Tingkat kemampuan Debitur untuk penyelesaian utang sangat rendah;
- Tidak ada itikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan utang;
- Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial (barang jaminan tidak marketable/bermasalah)

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah melaksanakan Penagihan secara langsung sekaligus Penyampaian Surat Paksa kepada debitur/Penangung Hutang, Penyerahan dari KPU Karawang dan RSUP Dr. Hasan sadikin Bandung.
- Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Debitur an. Edi suryanto penyerahan dari KPU Karawang
- Penelitian Lapangan terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Utang penyerahan dari RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam rangka penerbitan PSBDT
- Membuat surat Panggilan/himbauan penyelesaian hutang kepada Debitur dan Pemilik Barang Jaminan;
- Membuat surat pemberitahuan crash program keringanan utang kepada semua Debitur;
- Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Tindakan keperdataan/pembatasan administrasi
- Penyampaian Surat Paksa dan Penelitian Lapangan BKPN an. Sopyan Sujani, Sim Atong dan PT Surya Telemedia;
- Koordinasi dengan LPDB KUMKM terkait rencana pelaksanaan lelang barang jaminan penyerahan dari LPDB KUMKM;
- Permintaan dokumen asli barang jaminan kepada Pemkab Subang, Pemkab Karawang, Pemprov Jawa/ Bank Jabar Banten Syariah
- Melakukan penagihan langsung dan intensifikasi Crash Program Keringanan Utang
- Peningkatan tahap pengurusan Piutang Negara penyerahan dari DJKN a.n. KUD Karya Mekar dan penyerahan dari BLUPPB Karawang a.n. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (sekarang PT. Perikanan Indonesia)
- Melakukan pemeriksaan Piutang Negara Penanggung Utang a.n. Wihana Yusach dalam rangka penerbitan PSBDT dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PSBDT a.n. Wihana Yusac
- Melakukan penelitian lapangan terhadap Penanggung Utang a.n. Mulyadi dalam rangka penerbitan PSBDT dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan PSBDT

- Membuat surat panggilan, penelitian barang jaminan utang, pemblokiran barang jaminan utang, menerbitkan Surat Paksa BKPN a.n. KUD Karya Mekar.
- Penelitian lapangan dalam rangka penerbitan PSBDT.
- Koordinasi secara langsung/via surat dengan Penyerah Piutang (Dinas Ketahanan Pangan Kab. Karawang, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Subang dan Pemprov Jabar/BJB Syariah Bandung) terkait permintaan dokumen asli barang jaminan,
- Lelang barang jaminan utang BKPN penyerahan dari LPDB KUMKM (a.n. Kopontren Al Ikhlas dan KSU Mitra Sejahtera)
- Koordinasi via surat dengan Kantah Karawang dan Kantah Purwakarta terkait barang jaminan,
- Permohonan informasi Debitur ke Disdukcapil Jakarta Timur.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Pemeriksaan barang jaminan
- Melakukan Panggilan kepada debitur
- Penerapan Pengurusan Piutang Negara kepada Stakeholder KPKNL Purwakarta
- Koordinasi dengan Kantah Pemkab Subang untuk menindaklanjuti Penebusan Barang Jaminan KSU Fortuna

9. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang;
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Target pelaksanaan e-Auction dan e-Conventional Auction pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 adalah sebesar **94%** dari realisasi frekuensi lelang dan dapat direalisasikan sebesar **98,9%** dari frekuensi lelang dengan persentase capaian **105,25%**.

KPKNL	SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
Purwakarta	4a-CP Persentase Pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	Max/TLK

Realisasi	100,00%	99%	99%	99%	99%	98,9%	98,9%	
Capaian	106,38%	105,79%	105,79%	105%	105%	105,25%	105,25%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan periode Q4, KPKNL Purwakarta melaksanakan 847 frekuensi lelang 835 frekuensi e-auction, 3 frekuensi lelang secara e-konvensional, dan 9 frekuensi lelang konvensional atau dengan capaian sebesar 105,25%

b. Akar Masalah

- Sebagian besar lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Purwakarta sudah secara e-auction namun terdapat lelang kayu perhutani yang secara aturan masih diperbolehkan dilakukan secara konvensional, sehingga capaian lelang e-auction dan permohonan online tidak bisa maksimal

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan lelang secara e-auction

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan lelang secara e-auction

10. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online

Permohonan Lelang Online yaitu pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id

Target persentase pelaksanaan permohonan lelang online pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta yaitu sebesar **86%**. Dari target tersebut telah terealisasi sebesar **99,7%** atau dengan persentase capaian **115,95%**.

KPKNL	SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
Purwakarta	4b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	20,00%	40%	40%	60%	60%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi	99,57%	99,78%	99,78%	99,6%	99,6%	99,57%	99,57%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	115,95%	115,95%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Capaian pelaksanaan lelang online sejumlah 1043 permohonan lelang online dari 1046 total keseluruhan permohonan lelang atau sebesar 99,71%. Apabila dibandingkan target tahunan sebesar 86%, realisasi tersebut sudah melampaui target tahunan (indeks maksimal 120%). satu permohonan yang belum dilakukan secara online melalui website Lelang.go.id yaitu permohonan lelang kayu oleh Perhutani.

b. Akar Masalah

- Masih belum dapat dilakukannya permohonan secara online atas permohonan lelang kayu oleh Perhutani di seluruh Indonesia

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan lelang secara e-auction

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan lelang secara e-auction

11. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 sebesar **100%** dengan target **51** asset yang akan dievaluasi dan target yang direkomendasikan sebanyak **6** asset. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **151,57%** atau dengan capaian maksimal 120% (sebanyak **52** asset yang dievaluasi kinerjanya dan **6** asset yang direkomendasikan).

KPKNL	SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
Purwakarta	4c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	12,00%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	70,00%	104,5%	104,5%	110,8%	110,8%	151,57%	151,57%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Q4 tahun 2023, Target evaluasi sejumlah 51 tercapai 52 dan Target rekomendasi 6 tercapai 21.

b. Akar Masalah

- Pada triwulan I tahun 2023 masih terdapat rekomendasi evaluasi kinerja BMN tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja dan terdapat perbedaan pemahaman terkait perhitungan capaian berdasarkan paket

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Membentuk Tim Evaluasi Kinerja BMN tahun 2023
- Mengirimkan surat permintaan data kepada BPS Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja target evaluasi kinerja BMN tahun 2023 dan satuan kerja target tindak lanjut rekomendasi tahun 2022
- Melakukan survey lapangan kegiatan evaluasi kinerja BMN tahun 2023
- Melakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN tahun 2023
- Melaksanakan survey lapangan, perhitungan dan laporan evaluasi kinerja BMN tahun 2023 pada aplikasi SIMAN PORTOFOLIO

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan verifikasi data awal BMN yang akan menjadi target evaluasi kinerja BMN tahun 2024
- Membentuk Tim Evaluasi Kinerja BMN tahun 2024

12. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi ketergantungan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Target deviasi ketergantungan nilai penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 sebesar **25%**. Dari target tersebut, diperoleh capaian deviasi ketergantungan hasil penilaian sebesar **0%** dengan persentase capaian **200%** atau dengan capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
Purwakarta	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Seluruh hasil penilaian digunakan oleh pengelola Barang baik untuk Pemanfaatan BMN maupun Pemindahtanganan BMN sehingga dari target deviasi ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 25% (Minimize) belum terdapat deviasi ketergunaan hasil penilaian selama Triwulan I s.d. Triwulan IV 2023.

b. Akar Masalah

- Deviasi terjadi karena nilai yang dihasilkan oleh penilai lebih rendah dari nilai limit/nilai sewa yang diajukan oleh pemohon sehingga pengelola barang menetapkan nilai sesuai yang diajukan oleh pemohon tidak menggunakan nilai yang dihasilkan oleh penilai

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Optimalisasi kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian melalui Microsoft Teams
- Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip prinsip penilaian dan iindependensi penilai

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melaksanakan kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian melalui Microsoft Teams
- Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip prinsip penilaian dan iindependensi penilai

13. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Target rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2023 sebesar **70**. Dari target tersebut, dapat terealisasi sebesar **90,08** atau dengan persentase capaian **128,69%**.

KPKNL	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
Purwakarta	5b-CP Rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/AVG
Realisasi	92,69	91,25	91,25	90,18	90,18	90,08	90,08	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan Triwulan IV 2023, Triwulan IV 2023 realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 83,63.

b. Akar Masalah

- Potensi masalah akan terjadi dalam hal terdapat permohonan penilaian yang banyak menumpuk pada waktu bersamaan

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menghindari penilaian dilakukan secara TIM dengan anggota TIM seluruhnya JFPP
- Mengutamakan penugasan JFPP secara perorangan sehingga berkas permohonan dapat dibagi dan penjadwalan penilaian menjadi lebih cepat
- Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara TIM, anggota Tim melibatkan penilai/pegawai diluar JFPP
- Meminta bantuan tenaga penilai dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengutamakan penugasan JFPP secara mandiri sehingga berkas permohonan terdistribusi lebih banyak dan jadwal penilaian menjadi lebih cepat

- Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara Tim, anggota tim melibatkan penilai/pegawai di luar JFPP
- Meminta bantuan tenaga penilai dari Kanwil/Kantor Pusat sesuai kewenangan.

14. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 ditetapkan sebesar **86%**, dapat direalisasikan sebesar **91,1%** dengan capaian **105,94%**.

KPKNL	SS.6 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							
Purwakarta	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target		50%	50%	50%	50%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi		95,6%	95,6%	86,7%	86,7%	91,1%	91,1%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	105,94%	105,94%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Pada periode semester I 2023, telah diterbitkan 20 persetujuan pengelolaan BMN dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 18 persetujuan.
- Pada periode semester II 2023 telah diterbitkan 25 persetujuan pengelolaan BMN dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 23 persetujuan. Dari 2 persetujuan yang belum ditindaklanjuti, seluruhnya adalah persetujuan sewa BMN dan saat ini telah batal demi hukum karena tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak persetujuan diterbitkan.

b. Akar Masalah

- Pada periode semester I tahun 2023 terdapat 2 persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti.
- Pada periode semester II tahun 2023 terdapat 2 persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan monitoring terhadap batas waktu persetujuan
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait

- Pada periode Q2 telah diterbitkan surat himbauan kepada 2 (dua) satuan kerja untuk melakukan penertiban yang tidak menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan BMN pada periode semester II 2022
- Melakukan koordinasi kepada satuan kerja yang belum menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN periode semester I tahun 2023

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengirimkan surat pemberitahuan kepada satuan kerja untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan.
- Terhadap persetujuan yang tidak ditindaklanjuti dan telah melewati batas waktu akan dikirimkan surat klarifikasi dan permintaan penertiban kepada satuan kerja terkait

15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajaran diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*. Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 ditetapkan sebesar **100%** dengan Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat dan dapat direalisasikan sebesar **120%**.

KPKNL	SS.7 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
Purwakarta	7a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	15,00%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120,00%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120,00%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, jumlah bawahan seluruhnya 31 pegawai, jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria kompetensi pegawai sejumlah 31 pegawai. Dan jumlah bawahan yang memenuhi kriteria sejumlah 32 pegawai. Semua pegawai dihimbau untuk mengikuti diklat sesuai compentency yang diperlukan pada seksinya baik melalui elearning maupun Pelatihan jarak jauh.

b. Akar Masalah

- Belum ada Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi yang komprehensif;

- Pengembangan Kompetensi Mandatory cukup dominan
- Realisasi Pengembangan Kompetensi diluar rencana cukup banyak

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala
- Penyusunan rencana melalui IDP;
- Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory;
- Mencatat seluruh realisasi pengembangan kompetensi, yang direncanakan dan yang diluar rencana;
- Melaporkan ke Kanwil sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Terus mencatat tambahan atas rencana pengembangan kompetensi karena ada intervensi pengembangan kompetensi Mandatory;
- Terus mencatat realisasi pengembangan kompetensi di luar rencana, sebagai bahan perbaikan rencana dikemudian hari.

16. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2023 ditetapkan **100** dan dapat direalisasikan sebesar **109,43**, dengan capaian **109,43%**.

KPKNL	SS.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
Purwakarta	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	95,50%	95,50%	95,50%	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100,00%	94,1%	94,1%	98,76	98,76	109,43	109,43	
Capaian	104,715	98,53%	98,53%	98,76%	98,76%	109,43%	109,43%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Belanja Barang maupun Belanja Modal
- Penambahan DIPA topdown kegiatan BLBI dan Sertifikasi yang baru ditetapkan pada pertengahan Triwulan II dengan nilai yang cukup besar
- Adanya kemungkinan penghematan ataupun revisi pengurangan anggaran
- Pelaksanaan Belanja Modal yang tidak sesuai timeline, terutama dalam hal Optimalisasi Belanja Modal yang melalui mekanisme Revisi Tingkat DJA

b. Akar Masalah

- Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama kegiatan BLBI dimana melibatkan dana yang cukup besar
- Kebijakan Pemerintah yang mungkin akan diterapkan, sesuai dengan dinamika ekonomi global
- Kesesuaian timeline pelaksanaan optimalisasi belanja modal yang melalui mekanisme Revisi Tingkat DJA, dimana disaat bersamaan juga terdapat kegiatan penyusunan Pagu Alokasi TA 2024

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara berkala.
- Melakukan revisi anggaran dan RPD.
- Melakukan pengawasan berjenjang terhadap tiap kegiatan
- Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis
- Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan)

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara berkala.
- Melakukan revisi anggaran dan RPD.
- Melakukan pengawasan berjenjang terhadap tiap kegiatan
- Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis
- Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan)

17. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

IKU diukur dari 3 komponen yakni Proses Pengajuan Sertifikasi, Pemanfaatan Aplikasi BMN dan Pemanfaatan Sistem Pengadaan. Target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2023 sebesar **100%**, dapat direalisasikan sebesar **192%** dengan persentase capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
Purwakarta	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	10,00%	50%	50%		50%	100%	100%	Max/AVG
Realisasi	12,00%	12%	12%		50%	192%	192%	
Capaian	120,00%	25%	25%		100%	120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Terdapat Belanja modal ada yang tidak sesuai dengan *timeline*, tetapi untuk realisasi dananya sudah sesuai target. Realisasi sampai dengan triwulan 4 Tahun 2023 sebesar 192%

b. Akar Masalah

- Tidak terlaksananya belanja modal sesuai timeline

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan Barang Milik Negara tingkat pengguna

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Terkait belanja modal interior furniture kantor di tahun 2024 akan dilaksanakan tahapan beauty contest, demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran

18. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Target IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2023 sebesar **15%**. Dari target tersebut, diperoleh capaian deviasi data PNBPN fungsional DJKN sebesar **0%** dengan persentase capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
Purwakarta	8c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	Max/TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Pada IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN terdapat Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 (Pendapatan PL I) pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN dan Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 (Biad) pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN.

b. Akar Masalah

- Selisih biasanya disebabkan karena kesalahan penginputan NTPN dan pembulatan nominal PNBPN
- Adanya perbedaan tanggal buku antara aplikasi simponi dan aplikasi omspan
- Penginputan data pembayaran pada aplikasi focusPN tidak disertai dengan NTPN

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan konfirmasi antara penginput dropbox dan data pada penyeteroran bendahara terkait perbedaan tanggal buku
- Melakukan konfirmasi dan pengecekan dengan PIC dropbox atas data yang diinput dan membandingkan dengan data pada omspan
- Melakukan pengecekan data dropbox oleh kanwil untuk kesalahan input NTPN atau kekurangan input
- Input data NTPN bersamaan dengan menginput data pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan biad ke kas negara

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan penarikan data PNBPN dari omspan untuk konfirmasi ke penginput dropbox setiap awal bulan
- Input data NTPN bersamaan dengan menginput data pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan biad ke kas negara

19. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas

risiko. Target Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko yaitu **80**, dan dari target tersebut telah terealisasi sebesar **96,49** atau dengan persentase capaian **120,62%**.

KPKNL	SS.9 Organisasi yang fit and purpose							
Purwakarta	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target						80	80	Max/TLK
Realisasi						96,49	96,49	
Capaian						120%	120%	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Realisasi berasal dari hasil penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagai berikut: 1. (Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi (50%) dan Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai (50%)) bobot 60%; 2. Indeks Kualitas Manajemen Risiko (bobot 40%)

b. Akar Masalah

- Ketidaktepatan pelaksanaan tahapan pengelolaan kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja pegawai serta pengelolaan manajemen risiko sangat mempengaruhi hasil penilaian

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko

20. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Realisasi penilaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif berasal dari 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

- Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
- Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),

3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Target IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2023 sebesar **60**, dan dari target tersebut dapat terealisasi sebesar **97,67** atau dengan persentase capaian **162,93%** dan capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
Purwakarta	10a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/Kp
Target						60	60	Max/AVG
Realisasi						97,67	97,67	
Capaian						120%	120	

a. Isu Utama dan Implikasi

- Realisasi penilaian berasal dari 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi, Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), Penyusunan Profil Pegawai, Penyusunan Simpulan dan LPPI, Jumlah Pengaduan Masyarakat, Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI Kepuasan Stakeholders, dan Hasil Survei Penilaian Integritas.

b. Akar Masalah

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan pengawasan dan pengndalian untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan Pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan pengendalian sebagai tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.
- **Capaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja pada KPKNL Purwakarta Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebelumnya tahun 2022, 2021, 2020, dan 2019 sebagai berikut:

PNBP ASET

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNBP Aset	2019	49.142.167.172	55.185.370.156	112,29%
2.	PNBP Aset	2020	5.336.100.000	3.717.185.735	70%
3.	PNBP Aset	2021	6.006.000.000	6.259.167.351	104,21%
4.	PNBP Aset	2022	6.300.000.000	7.198.866.440	114,27%
5.	PNBP Aset	2023	6.400.000.000	9.239.221.640	144,36%

PNBP BEA LELANG

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BEA LELANG	2019	8.144.463.482	6.233.648.493	76,5%
2.	BEA LELANG	2020	8.827.000.000	7.816.527.453	89%
3.	BEA LELANG	2021	11.635.000.000	10.749.304.107	92,38%
4.	BEA LELANG	2022	18.305.000.000	20.393.163.290	111,41%
5.	BEA LELANG	2023	11.807.000.000	8.230.497.307	69,71%

POKOK LELANG

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	POKOK LELANG	2019	190.690.000.000	178.514.328.269	93,61%
2.	POKOK LELANG	2020	242.577.000.000	211.826.973.319	87%
3.	POKOK LELANG	2021	249.000.000.000	304.344.064.566	122,23%
4.	POKOK LELANG	2022	402.500.000.000	453.432.212.088	112,65%
5.	POKOK LELANG	2023	269.407.000.000	243.674.725.055	90,45%

PNBP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BIAD PPN	2019	85.990.166	118.772.991	138,12%
2.	BIAD PPN	2020	38.000.000	102.359.724	249%
3.	BIAD PPN	2021	38.000.000	7.590.195	19,97%
4.	BIAD PPN	2022	13.450.000	13.054.697	97,06%
5.	BIAD PPN	2023	2.500.000	4.113.392	164,54%

PIUTANG NEGARA DAPAT DISELESAIKAN (PNDS)

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNDS	2019	984.668.228	1.340.065.186	136,09%
2.	Penyelesaian Outstanding tahun 2016 ke Bawah	2020	148.735.388	150.116.245	101%
3.	Penyelesaian Outstanding tahun 2017 ke Bawah	2021	884.628.832	1.130.552.249	127,8%
4.	Penyelesaian Outstanding	2022	301.700.000	709.839.418	235,28%
5.	Penurunan Outstanding	2023	1.060.000.000	1.253.678.702	118,27%

BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BKPN SELESAI	2019	15	24	160%
2.	BKPN SELESAI	2020	15	22	147%
3.	BKPN SELESAI	2021	30	31	103,33%
4.	BKPN SELESAI	2022	30	30	100%
5.	BKPN SELESAI	2023	9	9	100%

- **Rencana Kerja dan Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 Pada KPKNL Purwakarta**
Rencana Kerja Tahun 2023

RINCIAN OUTPUT	PIC	Pagu	Realisasi	Target Output	Realisasi Output
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	PKN	1,760,000	-	30	38
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	PN & Lelang	1,942,000	747,000	30	35
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	PKN & Penilaian	32,360,000	30,438,446	35	61
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	PN	9,360,000	7,666,000	20	24
Risalah Lelang	Lelang	15,137,000	14,639,000	685	846
Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	Lelang	40,000,000	35,305,000	20	21
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	PKN	15,726,000	13,733,500	51	73
Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	PKN	37,947,000	35,320,500	333	860
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	PKN	5,280,000	3,200,000	1	3
Rekomendasi Hasil Penilaian	Penilaian	12,500,000	5,800,000	1	2
Penggalian Potensi Lelang	Lelang	60,000,000	54,496,335	1	4
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	PKN	31,452,000	30,030,000	365	494
Aset BUN yang Dikelola	PKN	114,742,000	101,950,000	24	29
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	PKN	499,128,000	204,351,773	3	4
Layanan Bantuan Hukum	HI	15,240,000	13,855,100	25	35
Kerumahtanggaan	Umum	52,622,000	48,859,957	12	12

Layanan Perkantoran	Umum	1,599,675,000	1,540,728,767	12	12
Peralatan Fasilitas Perkantoran	Umum	101,277,000	99,814,000	7	13
Gedung/Bangunan	Umum	405,076,000	401,027,000	525	525
Kehumasan	HI	8,700,000	7,555,409	20	29
Rekomendasi Kepatuhan Internal	KI	6,480,000	4,620,000	5	7
Total		3,066,404,000	2,654,137,787		

Penggunaan Sumber Daya

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Purwakarta dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2023, disampaikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai ASN : 32 orang
- b. Kenaikan pangkat : 3 orang
- c. Kenaikan Gaji Berkala : 10 orang
- d. Ijin belajar : 0 orang
- e. Pegawai pensiun : 0 orang
- f. Pegawai mengikuti diklat : 32 orang

Dari total pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2023 sebesar Rp3.066.404.000,- telah direalisasikan sebesar Rp2.654.137.787,- atau 86,56%. Dalam hal ini telah dilakukan efisiensi sebesar Rp412.266.213 atau 13,44% dengan realisasi seluruh capaian output memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS KINERJA

1. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Capaian penerimaan PNPB Q4 BMN 144% dari target tahunan.
- 2) Kesiapan satuan kerja dalam pemberkasan objek sertifikasi
- 3) Sampai dengan Q4 Target evaluasi sejumlah 51 tercapai 52 dan Target rekomendasi 6 tercapai 21
- 4) Pada periode semester I 2023, telah diterbitkan 20 persetujuan pengelolaan BMN dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 18 persetujuan.
- 5) Pada periode semester II 2023 telah diterbitkan 25 persetujuan pengelolaan BMN dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 23 persetujuan. Dari 2 persetujuan yang belum ditindaklanjuti, seluruhnya adalah persetujuan sewa BMN dan saat ini telah batal demi hukum karena tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak persetujuan diterbitkan.

b. Akar Masalah

- 1) Terdapat beberapa persetujuan sewa yang belum ditindaklanjuti dan persetujuan penjualan BMN yang belum dilakukan penjualan secara lelang, namun masa berlaku persetujuan belum melewati batas waktu yang ditentukan.
- 2) Pada periode semester I tahun 2023 terdapat 2 persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti.
- 3) Pada periode semester II tahun 2023 terdapat 2 persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti.
- 4) Pada Triwulan II beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan yaitu (a) Terdapat target K4 yang memiliki sertipikat yang salah ukuran sehingga menunggu waktu pengukuran ulang (sebagai tanah telah dihibahkan.) ; (b) Pada satker KPP Pratama Subang terdapat target K4 namun sertipikat hilang; (c) Pada Satker PN Karawang terdapat target K2 yang bersertipikat an. pihak ketiga, namun sertipikat tersebut hilang; (d) Pada satker Kemenag Purwakarta terdapat target K2 yang belum keluar dari sertipikat induk, namun pemilik sertipikat induk belum bersedia mengurus splitsing di BPN; (e) Kurangnya SDM pada satuan kerja yang merangkap tugas sehingga terlambat menyelesaikan proses permohonan.
- 5) Data objek sertifikasi tidak didukung dokumen yuridis (dok. Perolehan);
- 6) Satuan kerja tidak mengetahui letak objek sertifikasi dan batas-batas wilayah;
- 7) Data aset SIMAN tidak valid.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melakukan monitoring terhadap batas waktu persetujuan Pengelolaan BMN dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait
- 2) Melaksanakan koordinasi yang intensif kepada satuan kerja dan wasdal terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti dalam batas waktu persetujuan BMN belum berakhir.
- 3) Melakukan koordinasi dengan satker maupun Kantor Pertanahan secara kontinu agar pelaksanaan sertifikasi sesuai target
- 4) Membuat kertas kerja monitoring sertifikasi secara rinci baik proses maupun capaiannya sehingga memudahkan untuk monitoring dan selanjutnya apabila ditemukan kendala bisa dieskalasi ke Kantor Wilayah untuk disampaikan ke Kantor Pusat.
- 5) Melaksanakan survey lapangan, perhitungan dan laporan evaluasi kinerja BMN tahun 2023 pada aplikasi SIMAN Portofolio.
- 6) Usulan revisi penlok untuk mengganti beberapa NUP yang tidak bisa dilakukan pensertipikatan.

- 7) Menyelesaikan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK
- 8) Melakukan pendataan dan perhitungan dalam rangka optimalisasi BMN terhadap BMN yang telah dilakukan pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK pada tahun 2022

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Koordinasi dengan satuan kerja yang masa sewa BMN akan berakhir pada tahun 2024.
- 2) Koordinasi dengan satuan kerja yang memiliki BMN dalam kondisi rusak berat berdasarkan monitoring data master aset SIMAN, agar segera melakukan proses penjualan BMN
- 3) Melakukan verifikasi data awal, target pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024
- 4) Sosialisasi awal kepada satuan kerja yang menjadi target (TNI dan POLRI) tentang pendataan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK.
- 5) Pendataan dan perhitungan optimalisasi BMN dengan SBSK hasil pendataan dan penghitungan tahun 2023.
- 6) Sosialisasi kepada satuan kerja yang menjadi target sertifikasi.
- 7) Melakukan verifikasi data awal BMN yang akan menjadi target evaluasi BMN 2024
- 8) Membentuk Tim Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2024.
- 9) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada satuan kerja untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan
- 10) Terhadap persetujuan yang tidak ditindaklanjuti dan telah melewati batas waktu akan dikirimkan surat klarifikasi dan permintaan penertiban kepada satuan kerja terkait.

2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Bidang Piutang Negara

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Capaian penerimaan PNBPN Q4 Piutang Negara terealisasi 164%.
- 2) Capaian penurunan outstanding piutang negara berasal dari pelunasan crash program keringan, penerbitan PSBDT, dan angsuran hutang.
- 3) Capaian realisasi BKPN berasal dari pelunasan crash program keringanan utang 2 BKPN (Penyerah Piutang Pemkab Karawang / LUEP dan BJBS Pemprov Jabar); dan berasal dari Penerbitan PSBDT 7 BKPN (Penyetrah Piutang : DJKN dan RSUP Dr. Hasan sadikin Bandung).

b. Akar Masalah

- 1) Tingkat Kemampuan finansial debitur / Penanggung Hutang yang sebagian besar tergolong ekonomi kurang mampu sehingga mempengaruhi potensi penerimaan PNBP.
- 2) BKPN yang diurus sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang,
- 3) BKPN yang diurus Sebagian dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui keberadaan dan kejelasan dokumen kepemilikannya)
- 4) Penanggung Hutang tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang karena merasa bukan hutang pribadi maupun merasa tidak memiliki hutang.
- 5) Debitur tidak ditemukan

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Menerbitkan surat Panggilan/himbauan penyelesaian hutang kepada Debitur dan Pemilik Barang Jaminan.
- 2) Menerbitkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan tindakan keperdataan/pembatasan administrasi.
- 3) Menyampaikan Surat Paksa serta penelitian lapangan.
- 4) Koordinasi dengan LPDB KUMKM terkait rencana pelaksanaan lelang barang jaminan.
- 5) Permintaan dokumen asli barang jaminan kepada Pemkab Subang, Pemkab Karawang, Pemprov Jawa/ Bank Jabar Banten Syariah.
- 6) Menyampaikan surat pemberitahuan keringanan hutang (CP) kepada seluruh debitur dan dilakukan monitoring respon atau animo dari penanggung hutang terhadap CP kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan on the spot kepada debitur yang dianggap mampu mengikuti CP
- 7) Mengajukan lelang atas barang jaminan debitur
- 8) Koordinasi secara langsung dengan penyerah piutang terkait permintaan dokumen asli barang jaminan
- 9) Melakukan penggalan penyelesaian piutang negara untuk penurunan outstanding piutang nagara
- 10) Melakukan penagihan secara langsung serta menerbitkan PSBDT dengan melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu
- 11) Melaksanakan Penagihan secara langsung sekaligus Penyampaian Surat Paksa kepada debitur/Penanggung Hutang, Penyerahan dari KPU Karawang dan RSUP Dr. Hasan sadikin Bandung.

- 12) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Debitur an. Edi Suryanto penyerahan dari KPU Karawang
- 13) Penelitian Lapangan terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Utang penyerahan dari RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam rangka penerbitan PSBDT

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan Pemanggilan kepada debitur/Penanggung Hutang dan Pemeriksaan Barang jaminan Hutang debitur/Penanggung Hutang
- 2) Meningkatkan frekuensi penagihan dan menawarkan penyelesaian dengan mengikuti crash Program serta menawarkan penyelesaian dengan dibantu oleh keluarga Penanggung Utang
- 3) Melakukan pemeriksaan barang jaminan
- 4) Melakukan Panggilan kepada debitur
- 5) Penerapan Pengurusan Piutang Negara kepada Stakeholder KPKNL Purwakarta
- 6) Koordinasi dengan Kantah Pemkab Subang untuk menindaklanjuti Penebusan Barang Jaminan KSU Fortuna.

3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Bidang Penilaian

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Seluruh hasil penilaian digunakan oleh pengelola Barang baik untuk Pemanfaatan BMN maupun Pemindahtanganan BMN sehingga dari target deviasi ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 25% (Minimize) belum terdapat deviasi ketergunaan hasil penilaian selama Triwulan I s.d. Triwulan IV 2023.
- 2) Sampai dengan Triwulan IV 2023 realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 90,08.

b. Akar Masalah

- 1) Terdapat permohonan penilaian Non-BMN dengan jumlah objek yang banyak yang masuk dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan penilaian BMN, sehingga menyebabkan waktu pengerjaan laporan yang terbatas. Hal ini mengakibatkan penyelesaian laporan penilaian sewa melewati SOP.
- 2) Terdapat beberapa penugasan lain (penyusunan DKPB dan analisis hasil survey data properti) yang membutuhkan sumber daya penilai pada akhir tahun sehingga menyebabkan terganggunya penyelesaian permohonan penilaian yang sudah berjalan di waktu yang bersamaan.
- 3) Deviasi terjadi karena nilai yang dihasilkan oleh penilai lebih rendah dari nilai limit/nilai sewa yang diajukan oleh pemohon sehingga pengelola barang

menetapkan nilai sesuai yang diajukan oleh pemohon tidak menggunakan nilai yang dihasilkan oleh penilai

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Mengutamakan penugasan JFPP secara mandiri sehingga berkas permohonan terdistribusi lebih banyak dan jadwal penilaian menjadi lebih cepat
- 2) Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara Tim, anggota tim melibatkan penilai/pegawai di luar JFPP
- 3) Meminta bantuan tenaga penilai dari Kanwil/Kantor Pusat sesuai kewenangan.
- 4) Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip penilaian dan independensi penilai

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melaksanakan kegiatan pemaparan konsep laporan keuangan melalui Microsoft Teams
- 2) Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip penilaian dan independensi penilai
- 3) Mengutamakan penugasan JFPP secara mandiri sehingga berkas permohonan terdistribusi lebih banyak dan jadwal penilaian menjadi lebih cepat
- 4) Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara Tim, anggota tim melibatkan penilai/pegawai di luar JFPP
- 5) Meminta bantuan tenaga penilai dari Kanwil/Kantor Pusat sesuai kewenangan.

4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Bidang Lelang

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Capaian penerimaan PNBQ Q4 Lelang sebesar 70% (belum mencapai target yang ditetapkan).
- 2) Capaian pokok lelang di Q4 sebesar 90,45% (belum mencapai target yang ditetapkan)
- 3) Capaian Produktivitas Lelang Q4 terealisasi sebesar 105%
- 4) Banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dan lelang eksekusi harta pailit.
- 5) Capaian pelaksanaan lelang online sejumlah 1043 permohonan lelang online dari 1046 total keseluruhan permohonan lelang atau sebesar 99,71%. Apabila dibandingkan target tahunan sebesar 86%, realisasi tersebut sudah

melampaui target tahunan (indeks maksimal 120%). satu permohonan yang belum dilakukan secara online melalui website Lelang.go.id yaitu permohonan lelang kayu oleh Perhutani.

- 6) Sampai dengan periode Q4, KPKNL Purwakarta melaksanakan 847 frekuensi lelang 835 frekuensi e-auction, 3 frekuensi lelang secara e-konvensional, dan 9 frekuensi lelang konvensional

b. Akar Masalah

- 1) Banyaknya lelang TAP yang berasal dari jenis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Lelang Eksekusi Harta Pailit.
- 2) Adanya lelang kayu perhutani yang secara aturan masih diperbolehkan dilakukan secara konvensional, sehingga capaian lelang e-auction dan permohonan online tidak bisa maksimal
- 3) Banyaknya objek lelang yang kurang marketable
- 4) Beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menyebabkan calon pembeli memerlukan biaya dan waktu lebih apabila menjadi pemenang lelang terkait pengosongannya.
- 5) Kebijakan pemohon lelang terkait penurunan nilai limit dimana memerlukan beberapa kali lelang untuk sampai pada nilai likuidasi.
- 6) Kondisi ekonomi yang belum stabil, dan adanya beberapa obyek lelang yang masih dihuni oleh debitur menjadi salah satu penyebab masih banyaknya lelang TAP.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Perbankan, Satker, Dinas UMKM dan pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang
- 2) Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang yang berpotensi laku dan untuk mengajukan lelang kembali bagi lelang TAP.
- 3) Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik.
- 4) Koordinasi intens kepada pemohon lelang terutama objek lelang potensial AYDA
- 5) Para Jafung Pelelang saling berkoordinasi dengan perbankan BUMN untuk menggali jaminan-jaminan marketable yang potensial laku di Triwulan IV;
- 6) Koordinasi dan monitoring objek lelang pengadilan dengan nilai cukup besar, untuk mendorong agar segera mengajukan permohonan lelang.
- 7) Koordinasi dengan Kantor Pusat untuk aset properti yang potensial laku dan sudah ada peminat yaitu di Karawang agar didorong untuk dilelang tahun ini.
- 8) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait permohonan lelang online
- 9) Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan lelang secara e-auction

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Koordinasi dan penggalian potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, Satuan Kerja, dan pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang.
- 2) Sosialisasi pemanfaatan aplikasi lelang.go.id
- 3) Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang potensial laku
- 4) Koordinasi secara intens dengan pemohon lelang terutama objek lelang potensial AYDA.
- 5) Berkoordinasi dengan perbankan, BUMN untuk menggali jaminan-jaminan marketable yang potensial laku
- 6) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait permohonan lelang online
- 7) Melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan lelang secara e-auction
- 8) Sosialisasi ketentuan PMK 122/2023 kepada para stakeholder
- 9) Menindaklanjuti kerjasama dengan para pelaku UMKM

4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Bidang Kepatuhan Internal

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Realisasi berasal dari penilaian tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)
- 2) Realisasi berasal dari hasil penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagai berikut: 1. (Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi (50%) dan Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai (50%)) bobot 60%; 2. Indeks Kualitas Manajemen Risiko (bobot 40%)

b. Akar Masalah

- 1) Penilaian dilakukan oleh internal dan eksternal berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) sehingga tingkat kendali lemah.
- 2) Ketidaktepatan pelaksanaan tahapan pengelolaan kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja pegawai serta pengelolaan manajemen risiko sangat mempengaruhi hasil penilaian

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku
- 2) Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Meningkatkan Pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko
- 3) Melaksanakan pengendalian sebagai tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

5. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Bagian Umum

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Dari total jumlah pegawai 32 orang, 32 pegawai telah mencapai lebih dari 30 JP. Semua pegawai dihimbau untuk mengikuti diklat sesuai kompetensi yang diperlukan pada seksinya baik melalui elearning maupun Pelatihan jarak jauh.
- 2) Adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Belanja Barang maupun Belanja Modal
- 3) Penambahan DIPA topdown kegiatan BLBI dan Sertifikasi yang baru ditetapkan pada pertengahan Triwulan II dengan nilai yang cukup besar
- 4) Adanya kemungkinan penghematan ataupun revisi pengurangan anggaran
- 5) Pelaksanaan Belanja Modal yang tidak sesuai timeline, terutama dalam hal Optimalisasi Belanja Modal yang melalui mekanisme Revisi Tingkat DJA
- 6) Terdapat Belanja modal ada yang tidak sesuai dengan *timeline*, tetapi untuk realisasi dananya sudah sesuai target.

b. Akar Masalah

- 1) Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama kegiatan BLBI dimana melibatkan dana yang cukup besar
- 2) Kebijakan Pemerintah yang mungkin akan diterapkan, sesuai dengan dinamika ekonomi global

- 3) Kesesuaian timeline pelaksanaan optimalisasi belanja modal yang melalui mekanisme Revisi Tingkat DJA, dimana disaat bersamaan juga terdapat kegiatan penyusunan Pagu Alokasi TA 2024.
- 4) Tidak terlaksananya belanja modal sesuai timeline.

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melakukan pengawasan berjenjang terhadap tiap kegiatan
- 2) Melakukan monev secara berkala tiap bulan
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis
- 4) Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan Revisi Tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan)
- 5) Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan Barang Milik Negara tingkat pengguna
- 6) Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Terkait belanja modal interior furniture kantor di tahun 2024 akan dilaksanakan tahapan beauty contest, demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Terus mencatat tambahan atas rencana pengembangan kompetensi karena ada intervensi pengembangan kompetensi Mandatory;
- 2) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara berkala.
- 3) Melakukan revisi anggaran dan RPD.
- 4) Melakukan pengawasan berjenjang terhadap tiap kegiatan
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis
- 6) Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan)
- 7) Terus mencatat realisasi pengembangan kompetensi di luar rencana, sebagai bahan perbaikan rencana dikemudian hari.
- 8) Terus mencatat tambahan atas rencana pengembangan kompetensi karena ada intervensi pengembangan kompetensi Mandatory.

6. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Hukum dan Informasi

a. Isu Utama dan Implikasi

- Pada IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN terdapat Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 (Pendapatan PL I) pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN dan Selisih antara pembukuan PNBP MAP

425785 (Biad) pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OMSPAN/KPPN.

b. Akar Masalah

- Selisih biasanya disebabkan karena kesalahan penginputan NTPN dan pembulatan nominal PNBPN
- Adanya perbedaan tanggal buku antara aplikasi simponi dan aplikasi omspan
- Penginputan data pembayaran pada aplikasi focusPN tidak disertai dengan NTPN

c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan konfirmasi antara penginput dropbox dan data pada penyeteroran bendahara terkait perbedaan tanggal buku
- Melakukan konfirmasi dan pengecekan dengan PIC dropbox atas data yang diinput dan membandingkan dengan data pada omspan
- Melakukan pengecekan data dropbox oleh kanwil untuk kesalahan input NTPN atau kekurangan input
- Input data NTPN bersamaan dengan menginput data pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan biad ke kas negara

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan penarikan data PNBPN dari omspan untuk konfirmasi ke penginput dropbox setiap awal bulan
- Input data NTPN bersamaan dengan menginput data pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan biad ke kas negara

C. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023 KPKNL Purwakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp. 3.066.404.000,00** (tiga miliar enam puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	DIPA	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0%
2	Belanja Barang	Rp2.560.051.000,00	Rp2.153.296.787,00	84.11%
3	Belanja Modal	Rp506.353.000,00	Rp500.841.000,00	98.91%
	Total	Rp3.066.404.000,00	Rp2.654.137.787,00	86.56%

Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Purwakarta sebagai berikut:

	Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A)	Nilai IKPA (Bobot 50%)			94.88
	1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
	2. Deviasi Hal III DIPA	83.71	10	8.37
	3. Penyerapan Anggaran	87.03	20	17.41
	4. Belanja Kontraktual	91.43	10	9.14
	5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
	6. Pengelolaan UP dan TUP	99.59	10	9.96
	7. Dispensasi SPM	100.00	5	5.00
	8. Capaian Output	100.00	25	25.00
B)	Nilai SMART (Bobot 50%)			98.48
	1. Capaian Output	100.00	43.50%	43.50
	2. Efisiensi	100.00	28.60%	28.60
	3. Konsistensi RPD	98.81	18.20%	17.98
	4. Penyerapan Anggaran	86.56	9.70%	8.40
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV				96.68
Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV				109.43

D. INOVASI

1. Cluster Pusaka

Merupakan laman web sederhana berbasis google site yang menyediakan informasi layanan KPKNL Purwakarta, pengajuan layanan pengelolaan BMN secara online, dan Tracking Progres permohonan layanan BMN yang dapat diakses oleh pengguna jasa melalui tautan: s.id/kpknlpwk.

Latar Belakang:

Kebutuhan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi layanan KPKNL yang lebih jelas dan mudah diakses oleh pengguna jasa khususnya mengenai jenis dan persyaratan dokumen, pengajuan permohonan layanan dan progres penanganan layanan.

Tujuan:

Meningkatkan kepuasan pengguna jasa dengan menyediakan alat bantu yang dapat memudahkan para pengguna jasa untuk mengakses informasi terkait layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Site yang dapat diakses oleh pengguna jasa secara online.

2. Podcast Kanal On Air (Podcast Informatif Seputar Kekayaan Negara dan Lelang via Chanel Youtube.com)

Merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik dengan media kekinian, santai namun tetap informatif dan akuntabel.

Latar Belakang:

Penyampaian informasi tugas dan fungsi pokok KPKNL Purwakarta di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai bagian dari fungsi layanan dan keterbukaan informasi dengan model penyampaian yang dinilai mampu menjangkau pengguna layanan dan umumnya masyarakat secara lebih luas dengan media online yang populer.

Tujuan:

Memberikan informasi tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta sebagai instansi vertikal DJKN dengan kemasan kekinian, informatif dan akuntabel.

Jenis Inovasi:

Podcast Kanal On Air dan video kegiatan.

3. Talk To Me

Sarana Pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode.

Latar Belakang:

Adanya kebutuhan untuk mengakomodir pengaduan/saran dari pengguna layanan.

Tujuan:

Sarana evaluasi dalam upaya meningkatkan perbaikan pelayanan KPKNL Purwakarta kepada pengguna layanan.

Jenis Inovasi:

Sarana pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode yang ditindaklanjuti dengan telepon/wa/email.

4. Moncaki (Monitoring Capaian Kinerja)

Merupakan aplikasi berbasis google sheet dan google data studio yang menyediakan informasi Capaian Kinerja Unit KPKNL Purwakarta yang dapat diakses secara online oleh Pimpinan maupun oleh seluruh Pegawai KPKNL Purwakarta.

Latar Belakang:

Kebutuhan pimpinan KPKNL Purwakarta untuk mendapatkan informasi Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dapat diakses secara online dan kebutuhan seksi Kepatuhan Internal untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan capaian kinerja. Memberikan informasi capaian kinerja kepada Pimpinan dan seluruh pegawai KPKNL Purwakarta .

Tujuan:

Sebagai alat bantu Seksi Kepatuhan Internal dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja kepada Kanwil dan Kantor Pusat DJKN.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Sheet dan Google Data Studio.

5. Pendato (Pendataan Pegawai WFH/WFO)

Merupakan aplikasi berbasis google sheet yang berfungsi untuk mendata pegawai yang akan melaksanakan WFH (Work From Home) atau WFO (Work From Office).

Latar Belakang:

Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor SE-14 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali 3.

Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-12/MK.1/2021 tentang Penegasan Kembali Ketentuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND- 994/SJ/2021 tanggal 4 Juli 2021 hal Penegasan Pembatasan Bepergian dan Cuti serta Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan:

Mempermudah pembagian komposisi pegawai WFH dan WFO dan pengajuan usulan pegawai WFH secara kolektif oleh Sub bagian umum.

Memperoleh data untuk Laporan Harian Monitoring Kondisi Pegawai ke Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Jawa Barat.

Sebagai alat bantu pimpinan dalam monitoring pegawai WFH/WFO.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Sheet.

6. Monik PPNPM (Monitoring Kehadiran Pegawai PPNPM)

Merupakan aplikasi berbasis google Form yang berfungsi untuk Monitoring Pendataan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) secara digital melalui Google Forms (MONIK PPNPN).

Latar Belakang:

Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dan menghindari kontak langsung, maka presensi tidak dapat dilakukan melalui mesin presensi dengan sijek jari, sedangkan belum adanya fitur pada presensi yang digunakan Aparat Sipil Negara untuk PPNPN, maka perlu dibuatkan presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran.

Tujuan:

Menyediakan alat bantu presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran serta sebagai alat bagi pimpinan dalam Monitoring kedisiplinan PPNPM.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Form.

7. Sapa Pagi Senin

Kegiatan rutin untuk menguatkan nilai-nilai kementerian keuangan dan bertukar informasi antar pegawai serta evaluasi kegiatan.

Latar Belakang:

Adanya kebutuhan untuk media penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya kerja Kementerian Keuangan dan kode etik/kode perilaku ASN, sharing session pengetahuan baik terkait tugas pokok dan fungsi maupun pengetahuan lain yang bermanfaat bagi pegawai serta sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap minggu.

Tujuan:

Meningkatkan pemahaman dan pembiasaan pegawai akan nilai2/budaya Kemenkeu serta hak dan kewajiban ASN, serta meningkatkan kompetensi pegawai.

Jenis Inovasi:

Kegiatan Sapa Pagi Senin melalui pertemuan secara daring media Microsoft teams.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023



Penghargaan Penilaian IKPA Periode Triwulan I Tahun 2023 Kategori Pagu Lebih dari 2 s.d. 20 Miliar



Penghargaan Satker dengan Caapaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi No 9 Kab. Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara. Dengan wilayah kerja meliputi 3 Kabupaten yaitu Purwakarta, Karawang, Subang.

KPKNL Purwakarta telah melakukan yang terbaik dalam usaha memenuhi target pada indikator-indikator tersebut dengan inovasi-inovasi yang di buat. Perencanaan dan strategi-strategi dibahas pimpinan dengan seluruh pegawai maupun dengan stakeholder, baik dengan Dialog Kinerja Organisasi , Focus Grup Diskusi, maupun dengan sosialisasi, baik secara *online* maupun *offline*.

Secara umum pada Tahun 2023 KPKNL Purwakarta telah mencapai prestasi kerja yang sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2023 tercapai sebesar **110,37%**. Sebagian besar target yang telah ditetapkan melalui Indikator-indikator kinerja utama telah terealisasi sesuai atau bahkan melampaui target. Namun terdapat 2 (dua) IKU yang belum mencapai target yaitu IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang serta IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Pada IKU Persentase Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang belum mencapai target yaitu berasal dari PNBP Lelang, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya banyaknya lelang TAP, barang yang dilelang kurang *marketable*, dan daya beli masyarakat yang masih kecil. Disamping itu, KPKNL Purwakarta mendapatkan beberapa penghargaan yang merupakan buah dari dedikasi tinggi dari seluruh pegawai KPKNL Purwakarta.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, KPKNL Purwakarta juga membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk eksternal maupun internal KPKNL Purwakarta yaitu Percepatan SOP, Aplikasi Cluster Pusaka Inovasi dalam pemberian layanan berbasis elektronik berupa permohonan online pengelolaan BMN, Podcast/Youtube, Talk To Me Sarana Pengaduan, Aplikasi Moncaki, Aplikasi Monitoring Capaian Kinerja, Aplikasi Pendato, Aplikasi Pendataan WFH WFO pegawai, Aplikasi Monik PPNN, Aplikasi kehadiran pegawai PPNN secara digital, Sapa Pagi Senin.

Pada Tahun 2023 ini, KPKNL Purwakarta mewujudkan keberlanjutan atas Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang telah diraih pada tahun 2022. Hal ini dilakukan bersama baik internal pegawai KPKNL Purwakarta maupun seluruh stakeholder di lingkungan KPKNL Purwakarta. Disamping itu, tahun 2023 KPKNL Purwakarta ditunjuk sebagai Mentor untuk KPKNL Jakarta I dan KPKNL Jakarta III dalam meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Berkat mentoring tersebut, KPKNL Jakarta I dan KPKNL Jakarta III berhasil meraih predikat ZI-WBK pada tahun 2023.

Dengan tetap menjaga nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinegi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta menjalankan moto KPKNL Purwakarta yaitu “BAIK”, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Konsisten, kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

LAMPIRAN

A. Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan		
1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		
No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan		
1b-CP Persentase produktivitas lelang		
No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V

3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

1c-CP Indeks Integritas

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V

7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS. 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan

5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

3b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.3 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		
No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif		
4a-CP Persentase Pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction		
No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V

	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

4b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V

12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V
----	------------------------------------	---

SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

4c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V

	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

5b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V

10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.6 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.7 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

7a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V

4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V

8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

8c-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V

2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.9 Organisasi yang Fit and Purpose

9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V

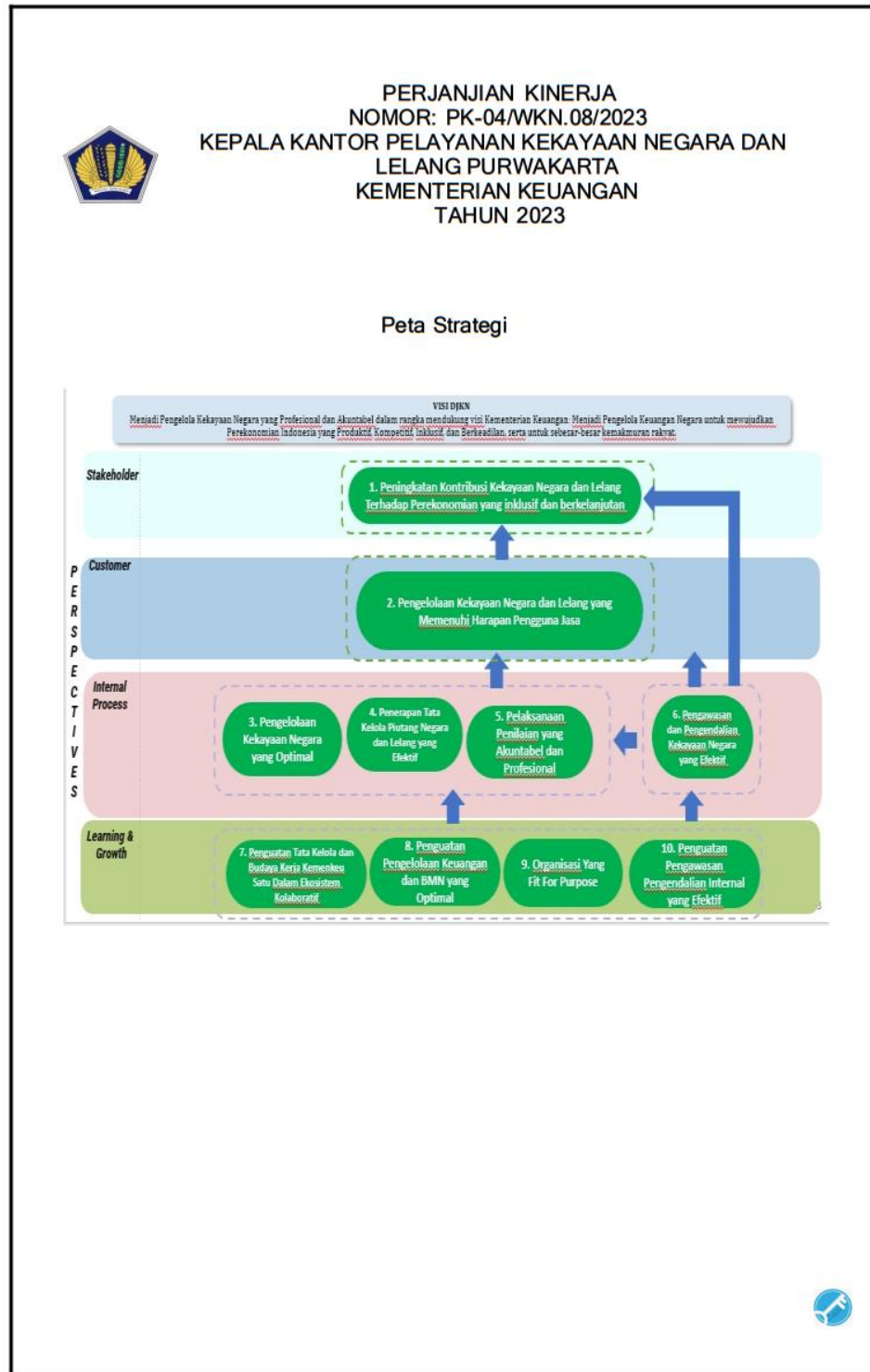
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

10a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

No	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	V
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	V
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	V
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	V
	capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	V
	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	V
	target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023	V
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	V
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	V
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	V
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	V
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	V
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	V
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	V
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	V

B. Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Purwakarta Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1b-CP Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4b-CP Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	4c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9.	Organisasi yang fit-for-purpose	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
10.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	10a-CP Indeks Integritas	88,67
		10b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Skala 4)

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko	Rp370.295.000,00
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp3.702.000,00
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3.	Pengelolaan Aset	Rp366.593.000,00
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
	Dukungan Manajemen	Rp2.189.070.000,00
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp13.380.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2.158.650.000,00
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp10.560.000,00
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp6.480.000,00
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tavianto Noegroho

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahjudi Prajogo

